



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURSIDI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 634210

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 725 m2/192 m2 di KAB / KOTA BUNGO, WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **270.000.000**

1. MOBIL, NISSAN JUKE MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HARTOP MINIBUS Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG PICK UP Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, KWASAKI KLX TRIL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. MOTOR, KAISAR KS 250 / SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. MOBIL, DATSUN PICKUP Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	707.748.596
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.677.748.596
III. HUTANG	Rp.	216.125.014
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.461.623.582

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.